

PELANGGARAN MAKSIM TUTUR DALAM PEMILIHAN CALON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 (*VIOLATION OF THE SPEECH ACT MAXIM IN THE PRESIDENTIAL CANDIDATES ELECTION DEBATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN 2019*)

Novi Paraswanty

SMKS Kristen Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, e-mail noviparaswanty19@gmail.com

Abstract

Violation of the speech maxim in the Presidential Candidates Election Debate of the Republic of Indonesia In 2019. This research was aimed at describing the forms of violation of the speech act maxim and describing the functions of violation of speech act maxim in the presidential candidate election debate of the Republic of Indonesia in 2019. This research was qualitative, and conducted by using the descriptive method. The source of data was the Presidential Candidate Election Debate of the Republic of Indonesia in 2019. The research results of speech maxim violation in the Presidential Candidate Election Debate of the Republic of Indonesia in 2019 consist of 5 research problems, which are: (1) the form of quantity of maxim violation, (2) the form of quality of maxim violation, (3) the form of relevance of maxim violation, (4) the form of method of maxim violation, and (5) the functions of speech acts of maxim violation. The form of quantity maxim violation consists of statements containing answers that comprise the information needed. The form of quality maxim violation consists of statements that contain answers which are less convincing, and contain answers which are similar or agree to the questions, and also contain answers which the evidence is not true. The form of relevance maxim violation consists of statements which contain answers that are not relevance with the questions and contain the contents of the correct answer but are not relevance. The form of method maxim violation consists of statements which contain ambiguous answers, and contain long and wordy answers. The function of the speech acts has four functions: Representative function which consists of statements of affirmation, conclusion, and facts. Expressive function consists of statements of praise, difficulty, happiness, and misery. Directive function consists of statements of ordering, advising, and commanding. Commissive function consists of statements of promise, rejection, and threat.

Keywords: violation of speech maxim, debate

Abstrak

Pelanggaran Maksim Tutur Dalam Debat Pemilihan Calon Presiden Republik Indonesia Tahun 2019. Tujuan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan wujud pelanggaran maksim dan mendeskripsikan fungsi tindak tutur pelanggaran maksim dalam debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,

dengan metode deskriptif. Sumber data penelitian ini ialah debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Hasil penelitian dari pelanggaran maksim tutur dalam debat Pemilihan Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 ini terdiri dari lima rumusan masalah yaitu : (1) wujud pelanggaran maksim kuantitas, (2) wujud pelanggaran maksim kualitas, (3) wujud pelanggaran maksim relevansi, (4) wujud pelanggaran maksim cara, dan (5) fungsi tindak tutur pelanggaran maksim. Wujud pelanggaran maksim kuantitas terdiri dari pernyataan yang mengandung jawaban yang melebihi informasi yang dibutuhkan. Wujud pelanggaran maksim kualitas berupa pernyataan yang mengandung jawaban yang kurang meyakinkan, mengandung jawaban yang sama atau sependapat, dan mengandung jawaban yang bukti kebenarannya tidak benar. Wujud pelanggaran maksim relevansi terdiri dari pernyataan yang mengandung jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan, dan mengandung isi jawaban yang benar tapi tidak sesuai. Wujud pelanggaran maksim cara terdiri dari pernyataan yang mengandung jawaban yang ambigu, dan mengandung jawaban panjang lebar, bertele-tele. Fungsi tindak tutur memiliki empat fungsi yaitu: Fungsi representatif yang terdiri dari pernyataan penegasan, kesimpulan, fakta. Fungsi ekspresif terdiri dari pernyataan memuji, kesulitan, kesenangan, kesengsaraan. Fungsi direktif terdiri dari pernyataan menyuruh, memberi saran, perintah. Fungsi komisif terdiri dari pernyataan janji, penolakan, ancaman.

Kata-kata kunci: *pelanggaran maksim tutur, debat*

PENDAHULUAN

Acara debat yang saat ini paling disukai warga Indonesia, yaitu debat Pilpres atau juga dapat dikatakan dengan pemilihan presiden karena dari debat tersebut masyarakat dapat mengetahui visi dan misi calon Pilpres dan dapat menentukan yang mana layak untuk menjadikan seorang pemimpin yang cocok bagi rakyatnya. Debat Pilpres ini ditayangkan di televisi pada saat pemilu dan acara ini menampilkan dialog terbuka antara dua kubu berseberangan yang memaparkan analisis disertai argumen-argumen dukungan atau penentangan (*pro-kontra*) juga kesimpulan mengenai sebuah isu yang hangat dibicarakan masyarakat dengan dikaji oleh beberapa tokoh undangan sebagai pemerhati topik yang diperdebatkan.

Pada tahun 2019 ini, forum debat mulai semarak lagi dalam rangka pemilihan umum di Indonesia (baik untuk pemilihan anggota DPRD maupun untuk calon Presiden dan wakil Presiden) juga diadakan debat argumentasi. Debat dilaksanakan melalui media televisi agar masyarakat mengetahuinya terutama masyarakat Indonesia yang harus tahu dan dapat memilih siapa pemimpin yang baik untuk rakyatnya.

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antar manusia dalam kehidupan masyarakat berupa bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi keberadaannya sangat penting di masyarakat. Komunikasi melalui bahasa

memungkinkan setiap orang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosialnya serta untuk mempelajari kebiasaan, kebudayaan, adat istiadat serta latar belakang masing-masing. Menurut Levinson (1983), pragmatik adalah hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari pengertian bahasa. Leech (1993, hlm.8) mengemukakan pragmatik adalah bidang linguistik yang mengkaji makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi tutur. Maksim merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Selain itu maksim juga disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerja sama. Peristiwa berbahasa dalam debat Pilpres tersebut sangat erat kaitannya dengan kekuasaan demi mencapai tujuan politik, yakni mengambil simpati dari masyarakat untuk memenangkan pemilihan presiden. Debat tersebut memiliki unsur dan aturan khusus dalam pelaksanaan yang harus ditaati oleh peserta debat. Namun, demi mencapai tujuan kemenangan, orang mudah dikuasai oleh emosi dan tidak lagi berpikir secara rasional.

Debat Pilpres sebagai bentuk bahan kampanye politik. Tidak jarang kedua pasangan melakukan pelanggaran maksim kerja sama dalam proses kegiatan. Berbahasa. Adapun pelanggaran berbahasa yang dilakukan oleh kedua pasangan dalam debat Pilpres RI tahun 2019 yaitu sebagai bentuk strategi politik dalam debat. Pelanggaran berbahasa dalam konteks politik tidak semata dilakukan kecuali tanpa adanya tujuan politik yang melatar belakangkannya. Tujuan utama pelanggaran berbahasa untuk mengambil simpati masyarakat luas.

METODE

Penelitian berjudul *Pelanggaran Maksim Tutur Dalam Debat Pemilihan Calon Presiden Indonesia Tahun 2019* ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelanggaran maksim tutur, deskripsi fungsi dari pelanggaran maksim tutur. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif, yaitu berupa percakapan dari pasangan Jokowi-Mahruh Amin dan Prabowo-Sandi dalam debat Pilpres RI tahun 2019. Data dalam penelitian ini berbentuk tuturan debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019, yang mengandung pelanggaran maksim tutur dan fungsi tindak tutur. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen. Dokumen yang digunakan adalah video *youtube* debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019.

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang juga dijadikan sebagai penafsiran dan penganalisis data. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati video, kemudian melakukan transkrip percakapan debat sebagai data penelitian. Setelah dilakukan transkrip, kemudian dilakukan penyaringan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang sudah diklasifikasikan kemudian di analisis dengan menggunakan teori prinsip kerja sama. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan metode simak (pengamatan) dan catat. Penggunaan teknik simak ini dikarenakan penelitian ini mengambil subjek data penelitian berbentuk video debat yang kemudian di transkrip.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis konteks percakapan dalam tayangan debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Kemudian penelitian mengunduh video debat tersebut dari situs *youtube*. Setelah diunduh, tahap selanjutnya dilakukan transkrip data serta pemilahan berdasarkan sesi debat dan tema debat.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data yaitu:

- a. Mengumpulkan data dan menonton secara berulang-ulang video rapat
- b. Mentranskrip atau mencatat percakapan para anggota yang sedang rapat pada video Debat Pilpres RI Tahun 2019 .
- c. Menganalisis atau menelaah tuturan kalimat-kalimat yang menyatakan pelanggaran maksim kerja sama.
- d. Mengklasifikasikan wujud dan fungsi pelanggaran maksim kerja sama
- e. Mendeskripsikan dan menyimpulkan wujud dan fungsi pelanggaran maksim kerja sama.

Penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan temuan dengan menggunakan metode berupa pengamatan secara lebih cermat dalam penelitian ini adalah dengan menonton dan menyimak tuturan dalam debat Pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian pelanggaran maksim tutur dalam debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 ini berupa deskripsi wujud pelanggaran maksim tutur dan fungsi pelanggaran maksim tutur. Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan, ditemukan hasil penelitian pelanggaran maksim tutur kuantitas, kualitas, relevansi, cara, dan serta fungsi maksim tutur. Keseluran data yang terkumpul diambil dari transkrip tiga percakapan debat

Pilpres RI tahun 2019. Ketiga debat Pilpres RI tahun 2019 tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019 tema “Hukum, HAM, Korupsi dan Teorisme”, kedua pada tanggal 17 February 2019 tema “Infrastruktur, Pangan, Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, serta terakhir dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 tema “Pendidikan, Kesehatan, Ketenangakerjaan, Sosial dan Budaya”. Sumber data tersebut diambil dari youtube video debat calon presiden 2019.

Adapun rekapitulasi wujud pelanggaran maksim tutur dan fungsi maksim tutur yang di temukan berjumlah 41 data dengan total pelanggaran maksim kuantitas berjumlah 10 data, pelanggaran maksim kualitas berjumlah 18 data, pelanggaran maksim relevansi berjumlah 3 data, dan pelanggaran maksim cara berjumlah 10 data.

Hasil pendeskripsian tuturan yang melanggar maksim tutur dalam debat Pilpres RI tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi wujud dan fungsi pelanggaran maksim tutur dalam debat Pilpres tahun 2019 berikut ini.

Tabel 1

Presentasi Wujud Pelanggaran Maksim Tutur Debat Pilpres Tahun 2019

No.	Pelanggaran Maksim Tutur	Frekuensi	Persentasi
	Maksim Kuantitas	10	24,4 %
	Maksim Kualitas	18	43,90 %
	Maksim Relevansi	3	7,3 %
	Maksim Cara	10	24,4 %
	Jumlah	41	100%

Presentasi data didapat berdasarkan jumlah temuan pelanggaran maksim tutur dibagi dibagi jumlah keseluruhan tuturan yang terdapat pada *Pelanggaran Maksim Tutur Dalam Debat Pemilihan Calon Presiden Indonesia Tahun 2019*, kemudian dikali 100%. Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah kesalahan yang paling banyak ditemukan pada pelanggaran maksim kualitas.

Selain hasil analisis di atas, hasil dari penelitian fungsi Pelanggaran Maksim Tutur Dalam Debat Pemilihan Calon Presiden Indonesia Tahun 2019 berupa deskripsi tuturan yang

menyebabkan pelanggaran maksim tutur. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, ditemukan fungsi Pelanggaran Maksim Tutur Dalam Debat Pemilihan Calon Presiden Indonesia Tahun 2019, yang meliputi fungsi representatif, fungsi ekspresif, fungsi direktif, dan fungsi komisif.

Tabel 2

Presentasi Fungsi Tindak Tutur

No	Fungsi Tindak Tutur	Frekuensi	Persentasi
	Fungsi Representatif	17	41,46 %
	Fungsi Ekspresif	6	14,64 %
	Fungsi Direktif	11	26,83 %
	Fungsi Komisif	7	17,07 %
	Jumlah	41	100 %

Wujud Pelanggaran Maksim Tutur Kuantitas

[1] Konteks : Prabowo Subianto memberikan tanggapan kembali atas tanggapan Joko Widodo tentang perbedaan pendapat mengenai kepastian hukum yang di jawab oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Jokowi : Kami berbeda denganpak Prabwo dan Pak Sandi

Prabowo : Baik terima kasih, kalau saya kok tidak liat perbedaan

Pada data (1) merupakan konteks yang menerangkan bahwa Prabowo Subianto memberikan tanggapan kepada Joko Widodo mengenai perbedaan pendapat tentang kepastian hukum. Pernyataan tersebut di buktikan dengan informasi jawaban berupa kalimat “*baik terima kasih saya kok tidak lihat perbedaan*”. Pada tuturan yang dinyatakan oleh Prabowo Tuturan tersebut mengandung maksim kuantitas karena jawabanya melebihi informasi yang diperlukan.

Wujud Pelanggaran Maksim Tutur Kualitas

[2] Konteks : Sandiaga Uno menambahkan jawaban dari pertanyaan

Moderator : Apa strategi untuk menyelesaikan masalah tentang kepastian hukum?

Sandiaga Uno : Harmonisasi dan Sinkronisasi bisa menghadirkan kepastian hukum. kami juga pastikan hukum ini dapat menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi dan membuka lapangan kerja.

Pada data [2] merupakan konteks yang menjelaskan Sandiaga Uno menjawab pertanyaan dari moderator tentang kepastian hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kalimat tutur dari Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa “*kami juga pastikan bahwa hukum ini bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi dan membuka lapangan kerja*”. Jawaban pada kalimat di atas tersebut memiliki informasi yang kebenarannya kurang meyakinkan.

Wujud Pelanggaran Maksim Relevansi

[3] Konteks : Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menyampaikan visi dan misi.

Moderator : Saya persilahkan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin untuk menyampaikan visi dan misi Anda dengan topik hukum dan HAM, terorisme dan korupsi.

Jokowi : Saya berkeyakinan semakin maju semakin demokratis dan modern sebuah negara maka penegakan hukum dan akan semakin baik bukan hanya hak sipil dan politik yang penting tetapi pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan indonesia seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap pemodalan dan hak atas pembangunan.

Pada data [3] merupakan konteks yang menjelaskan bahwa Joko Widodo menjawab pertanyaan dari moderator tentang visi misi. Pada jawaban Joko Widodo telah terjadinya pelanggaran maksim relevan karena jawaban Joko Widodo tidak relevansi dengan topiknya membelok soal ekonomi, padahal kasus yang dibahas soal hukum dan HAM, terorisme dan korupsi. Jawaban pelanggaran maksim relevansi tersebut dibuktikan dengan adanya kalimat yang menyatakan bahwa “*ekonomi sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan indonesia seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap pemodalan dan hak atas pembangunan*”. Pernyataan tersebut mengandung pelanggaran maksim relevansi yang jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan atau membelok ke pembahasan mengenai permasalahan ekonomi.

Wujud Pelanggaran Maksim Cara

[4] **Konteks** : Joko Widodo menjawab pertanyaan moderator

Moderator : Saya persilahkan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin untuk menyampaikan visi dan misi anda dengan topik hukum dan HAM.

Jokowi : Memang kita masih memiliki beban pada pelanggaran HAM dan berat masa lalu tidak mudah dapat menyelesaikannya. karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi, tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini.

Pada data [4] tersebut menunjukkan adanya pelanggaran maksim cara. Joko Widodo menjawab pertanyaan dari moderator tersebut mengandung informasi jawaban yang ambigu. Hal tersebut dibuktikan dengan informasi jawaban berupa “*Memang kita masih memiliki beban pada pelanggaran HAM dan berat masa lalu tidak mudah dapat menyelesaikannya*”. Jawaban tersebut mengandung informasi yang ambigu atau kalimat ucapan perkataannya masih kurang jelas untuk dipahami.

Fungsi Tindak Tutur

a. Fungsi Representatif

[1] **Konteks** : Prabowo Subianto memberikan tanggapan kembali atas tanggapan Joko Widodo tentang perbedaan pendapat mengenai kepastian hukum pertanyaan dari moderator.

Jokowi : Apa strategi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut?

Prabowo : Baik terima kasih kalau saya kok tidak lihat perbedaan
karena memang pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk melakukan perbaikan kemudian juga menghasilkan produk produk itu ini tugas pemerintah adalah presiden adalah *chief law and enforcement officer* adalah penanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum itu tanggung jawab.

Pada data [1] merupakan konteks yang menjelaskan terjadinya pelanggaran maksim kuantitas oleh Prabowo Subianto. Adapun pelanggaran tersebut mempunyai fungsi tindak tutur representatif. Prabowo Subianto mengemukakan penegasan bahwa tidak ada perbedaan.

Kalimat tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut *“saya kok tidak lihat perbedaan karena memang pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk melakukan perbaikan kemudian juga menghasilkan produk produk itu ini tugas pemerintah adalah presiden adalah chief law and enforcement officer adalah penanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum itu tanggung jawab”*. Fungsi representatif tindak tutur dalam pelanggaran maksim tersebut digunakan sebagai cara untuk menyatakan suatu penegasan.

b) Fungsi Ekspresif

[2] Konteks : Sandiaga Uno menanggapi jawaban Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin : Riset menentukan maju mundurnya suatu negara yang mengembangkan risetnya dia akan menjadi negara yang maju karena itu kami akan mengembangkan riset dengan mengkoordinasikan semua alokasi dana.

Sandiaga Uno : Saya yakin anak-anak Indonesia pintar-pintar sekali. Saya bertemu di seribu lima ratus titi mereka memancarkan optimisme mereka ingin diberikan peluang kuncinya adalah peluang untuk maju dan kami yakin Indonesia adil dan Makmur.

Pada data [2] telah terjadinya pelanggaran maksim, yaitu maksim kuantitas. Adapun pelanggaran tersebut mempunyai fungsi sebagai bentuk ekspresif. Sandiaga Uno mengatakan anak-anak Indonesia pintar-pintar dan memancarkan optimisme. Pernyataan tersebut mengandung fungsi ekspresif memuji gagasan yang dikemukakan oleh Sandiaga Uno dibuktikan melalui kutipan *“Saya yakin anak-anak Indonesia pintar-pintar sekali. Saya bertemu di seribu lima ratus titi mereka memancarkan optimisme mereka ingin diberikan peluang kuncinya adalah peluang untuk maju dan kami yakin Indonesia adil dan Makmur”*. Fungsi ekspresif dalam pelanggaran tersebut digunakan sebagai cara untuk memberikan apresiasi berupa pujian kesenangan.

c) Fungsi Direktif

[3] Konteks : Prabowo Subianto menanggapi jawaban dari Joko Widodo tentang HAM.

Jokowi : Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan

Prabowo : Menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh undang dasar pak jadi sebetulnya siapa pun boleh menyatakan pendapat dukungan siapapun Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan.

Pada data [3] merupakan konteks Prabowo Subianto menanggapi jawaban dari Joko Widodo tentang HAM. Pada tanggapan Prabowo telah terjadinya pelanggaran maksim, yaitu maksim kuantitas. Adapun pelanggaran tersebut mempunyai fungsi sebagai bentuk direktif. Didalam hal tersebut Prabowo Subianto mengatakan sesuatu untuk menyuruh hal tersebut dilihat pada kalimat kami mohon Bapak perhitungkan. Pernyataan tersebut mengandung fungsi direktif perintah gagasan yang dikemukakan oleh Prabowo Subianto tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan *“Menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh undang dasar pak jadi sebetulnya siapa pun boleh menyatakan pendapat dukungan siapapun Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan”*.

Fungsi direktif dalam pelanggaran tersebut digunakan sebagai cara untuk menyuruh orang lain dalam artian kalimat memerintah orang lain untuk memperhitungkan tentang HAM.

d) Fungsi Komisif

[4] Konteks : Sandiaga Uno menambahkan jawaban dari pertanyaan moderator

Moderator : Apa strategi anda untuk menyelesaikan masalah tentang kepastian.

Sandiaga Uno : Harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan bukan hanya untuk orang kaya tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat kami juga pastikan bahwa hukum ini bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi untuk membuka lapangan kerja.

Pada data [4] merupakan konteks Sandiaga Uno menambahkan jawaban dari pertanyaan moderator tentang kepastian hukum. Pada jawaban Sandiaga Uno telah terjadinya pelanggaran maksim, yaitu maksim kualitas. Adapun pelanggaran tersebut mempunyai fungsi tindak tutur sebagai bentuk komisif. Sandiaga Uno untuk menjanjikan untuk pastikan bahwa hukum ini bisa menghadirkan satu peluang. Didalam jawaban Sandiaga Uno dapat dibuktikan melalui kutipan berikut *“Harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan bukan hanya untuk*

orang kaya tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat kami juga pastikan bahwa hukum ini bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi untuk membuka lapangan kerja”.

Fungsi komisif dalam pelanggaran tersebut digunakan sebagai cara untuk memberikan janji politik kepada masyarakat Indonesia bahwa pasangan tersebut berkomitmen akan menghadirkan satu peluang berinvestasi untuk membuka lapangan kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah, terdapat lima hal pokok yang perlu disampaikan dalam kesimpulan ini. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, pada debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 data yang dianalisis ada tiga tema debat yaitu dengan tema *pertama* debat membahas penegakan hukum dan HAM, pemberantasan terorisme dan korupsi, *kedua* tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan *ketiga* tema pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Dari ketiga data tersebut ditemukan pelanggaran terhadap maksim kuantitas sebanyak 10 pelanggaran maksim kuantitas. Dari ke sepuluh pelanggaran maksim kuantitas data tersebut di ambil dari tiga tema debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019.

Kedua, pada debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 data yang dianalisis ada tiga tema debat yaitu dengan tema *pertama* debat membahas penegakan hukum dan HAM, pemberantasan terorisme dan korupsi, *kedua* tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan *ketiga* tema pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Dari ketiga data tersebut ditemukan pelanggaran terhadap maksim kualitas sebanyak 18 pelanggaran maksim kualitas. Dari ke delapan belas pelanggaran maksim kualitas data tersebut di ambil dari tiga tema debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019.

Ketiga, pada debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 data yang dianalisis ada tiga tema debat yaitu dengan tema *pertama* debat membahas penegakan hukum dan HAM, pemberantasan terorisme dan korupsi, *kedua* tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan *ketiga* tema pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Dari ketiga data tersebut ditemukan pelanggaran terhadap maksim relevansi

sebanyak 3 pelanggaran maksim relevansi. Dari ke tiga pelanggaran maksim relevansi data tersebut di ambil dari tiga tema debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019.

Keempat, pada debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 data yang dianalisis ada tiga tema debat yaitu dengan tema *pertama* debat membahas penegakan hukum dan HAM, pemberantasan terorisme dan korupsi, *kedua* tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan *ketiga* tema pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Dari ketiga data tersebut ditemukan pelanggaran terhadap maksim cara sebanyak 10 pelanggaran maksim cara. Dari ke sepuluh pelanggaran maksim cara data tersebut di ambil dari tiga tema debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019.

Kelima, fungsi Tindak tutur dari pelanggaran maksim tutur debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Dari hasil data penelitian pelanggaran maksim tutur debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 ada empat fungsi tindak tutur yaitu fungsi representatif sebanyak 17 data, fungsi ekspresif sebanyak 6 data, fungsi direktif sebanyak 11 data, dan fungsi komisif sebanyak 7 data.

Dari jumlah kesimpulan seluruh pelanggaran maksim tutur pada debat pemilihan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019 berjumlah total 41 pelanggaran maksim dan 41 data fungsi tindak tutur dari pelanggaran maksim tutur pada debat Pilpres RI tahun 2019.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, hal-hal, yang dapat disarankan yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Serta diharapkan juga sebagai referensi dalam ilmu pragmatik, khususnya materi maksim tutur berdasarkan Grice.

DAFTAR RUJUKAN

<https://youtu.be/E6G85GvYdzw>.

https://youtu.be/O_Rd2bDHZle.

https://youtu.be/3MqHw_OEJNo.

Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*, London: Cambridge University Press.

Leech, G. (1993). *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.